

BAB II

LANDASAN TEORITIK DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Jhingan, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan pendapatan nyata per kapita lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi berbagai perubahan yang akan meningkatkan sumber-sumber produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nyata per kapita.¹¹ Sedangkan menurut Djojohadikusumo dalam buku Rudi Badrudin menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produksi dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.¹² Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk pendapatan nasional.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Ahli Ekonomi Klasik

Menurut Adam Smith terdapat dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan

¹¹ M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

¹² Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah (Edisi Kedua)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), Hlm. 117.

penduduk dan output total yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan persediaan capital atau modal.¹³ Perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Dan apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus-menerus berlangsung secara kumulatif. Apabila pasar berkembang, maka pembagian kerja dan spesialisasi akan terjadi serta akan menimbulkan kenaikan produktivitas yang akan menyebabkan pendapatan per kapita terus bertambah tinggi. Sedangkan menurut teori Ricardo dan Malthus bertolak belakang dengan teori Adam Smith, mereka menyatakan bahwa dalam jangka panjang perkembangan ekonomi akan mencapai *stationary state* atau suatu keadaan dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan memperbesar jumlah penduduk hingga menjadi dua kali lipat dalam waktu satu generasi akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih rendah.

b. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Ahli ekonomi yang menjadi perintis mengembangkan teori pertumbuhan Neo-Klasik adalah Solow dan kemudian

¹³ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah (Edisi Kedua)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), Hlm. 126

diikuti oleh beberapa ahli ekonomi lain seperti Edmud Phelps, Harry Johnson, dan J. E Meade. Dalam analisis Neo-Klasik, permintaan masyarakat tidak menentukan laju pertumbuhan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertambahan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi.¹⁴ Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas barang-barang modal akan tetap sepenuhnya digunakan dari masa ke masa.

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam menurut Al-Ghazali

Menurut Al-Ghazali, terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh terhadap tercapainya kesejahteraan sosial yaitu; Agama (*din*), Jiwa (*nafs*), Akal(*aql*), Keturunan (*nasl*), dan Harta (*maal*). Ia mengemukakan konsep masalah dalam harta untuk mencapai kesejahteraan bersama yang merata (sosial), karena menurut Al-Ghazali peran dan fungsi harta selain sebagai wasilah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kestabilan ekonomi yang adil dan merata, selain itu harta juga dapat menimbulkan berbagai keburukan apabila tidak dipergunakan dengan bijak.

¹⁴ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan (Edisi Kedua, Cetakan ke-8)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 246

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan terjadi ketika tercapainya kemaslahatan, dan apabila kemaslahatan tersebut telah tercapai maka tujuan syara' (*maqashid al syari'ah*) pun telah tercapai. Dalam ayat suci Al-Qur'an telah disebutkan:¹⁵

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS: Ali ‘Imran: 14)

Al-Ghazali menyimpulkan bahwa utilitas sosial dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Dharuriat (primer)*, merupakan kebutuhan utama dan paling penting agar manusia dapat menjalankan kehidupannya dan memelihara kelima prinsip tersebut di atas.
- b. *Hajiyat (sekunder)*, merupakan kebutuhan setelah kebutuhan *dharuriyat* yang terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak mengancam keselamatan hidup umat manusia bagi pemeliharaan kelima prinsip di atas, tetapi dibutuhkan untuk meringankan kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan.

¹⁵ Al-Qur'an dengan Tajwid Blok Warna, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hlm. 52

- c. *Tahsiniyat* (tersier), secara khusus kategori ini meliputi persoalan-persoalan yang tidak mengancam kelima prinsip di atas yaitu Agama (*din*), Jiwa (*nafs*), Akal(*aql*), Keturunan (*nasl*), dan Harta (*maal*). kebutuhan ini muncul ketika kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyyat* telah terpenuhi

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa saja, akan tetapi juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan akhirat.¹⁶ Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapain materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah, semakin tinggi

¹⁶ Almizan, "Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 2 (Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2016), hlm. 207.

PDRB maka semakin tinggi *output* barang dan jasa yang dihasilkan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi dapat diukur dari seberapa besar PDRB per kapita yang diterima. Namun demikian menurut Tambunan, tingginya PDRB per kapita yang diterima tersebut belum mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya karena mungkin saja terjadi nilai PDRB per kapita tinggi namun sebagian besar PDRB per kapita tersebut dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat.¹⁷ Pertumbuhan ekonomi sebagai nilai relatif dari perubahan PDRB dari waktu ke waktu menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu pula. Untuk melihat laju pertumbuhan PDRB dapat dihitung dengan:

$$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-i}}{PDRB_{t-i}}$$

B. Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa Indonesia menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

¹⁷Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*, (Jakarta: Ghalia Indonesia Erlangga, 2001).

Menurut Machfud Sidik, konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*).¹⁸

Menurut Oates, desentralisasi Fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam memproduksi dan menyediakan barang-barang public.¹⁹ Dalam proses desentralisasi, kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat diberikan ke pemerintahan daerah sehingga dengan demikian akan terwujud pergeseran kekuasaan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jika sebelumnya arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, maka arus dinamika kekuasaan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

1. Pengertian Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan sebagian tanggung jawab fiskal atau keuangan Negara dari pemerintah pusat kepada

¹⁸ Machfud Sidik, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*, Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia: 1-24, <http://www.depkeu.go.id>, diakses pada tanggal 6 Februari 2020, pukul 14.00.

¹⁹ Khubbi Abdillah dan Djoko Mursinto, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Ekonomi antar Daerah serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* No 3 (Universitas Airlangga, 2014), hlm. 195

jenjang pemerintahan di bawahnya (provinsi, kabupaten atau kota).²⁰ Sedangkan menurut Saragih dalam buku Rudi Badrudin menyatakan bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan layanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.²¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal adalah pelimpahan atau penyerahan wewenang (tanggung jawab dan fungsi) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memberikan otoritas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri keuangan daerahnya guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional.

2. Tujuan Desentralisasi Fiskal

Menurut Sidik dan Abimanyu dalam buku Rudi Badrudin menyatakan bahwa ada beberapa tujuan dari desentralisasi fiskal, yaitu:²²

²⁰ Wahyudi Kumorotomo, *Desentralisasi Fiskal (Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004)*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

²¹ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah (Edisi Kedua)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 39.

²² Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah (Edisi Kedua)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 39.

- a. Membantu meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah
- b. Memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, dan mobilisasi pendapatan daerah dan nasional
- c. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah
- d. Mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, memastikan pelaksanaan layanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah.
- e. Memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal yaitu untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menciptakan persaingan yang sehat antardaerah dan mendorong timbulnya inovasi. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan baik apabila pemerintah pusat mampu melakukan pengawasan dan *enforcement*, serta terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah sehingga akan

mengurangi ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat. Menurut Susanti dalam buku Rudi Badrudin menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerahnya sehingga mampu bersaing dengan daerah lain melalui penghimpunan modal pemerintah daerah untuk kebutuhan investasi dan atau kemampuan berinteraksi dengan daerah lain.²³

Agar tujuan desentralisasi fiskal tercapai, maka ada empat elemen utama dalam desentralisasi fiskal yang harus diperhatikan, yaitu:²⁴

- a. Sistem dana perimbangan (transfer)
- b. Sistem pajak dan pinjaman daerah
- c. Sistem administrasi dan anggaran pemerintahan pusat dan daerah
- d. Penyediaan layanan publik dalam konteks penerapan Sistem Pelayanan Minimal (SPM)

²³ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah (Edisi Kedua)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 20.

²⁴ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah (Edisi Kedua)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm 49.

3. Sumber Pendapatan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1) Hasil Pajak Daerah
 - 2) Hasil Retribusi Daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Potensi dana pembangunan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang paling besar dan lestari bersumber dari masyarakat yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat sehingga meningkatkan penyelenggaraan otonomi dan keleluasaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Namun pada praktiknya, alokasi transfer ke daerah menjadi sumber pembiayaan dominan pada sebagian besar pemerintah daerah di Sumatera Bagian Selatan, karena

pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri masih sangat terbatas.

4. Ruang Lingkup Pelaksanaan Desentralisasi

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1), daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal dibagi menjadi tiga macam pola daerah, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Oleh karena itu, gubernur memiliki peranan ganda, yaitu gubernur sebagai kepala daerah, dan perangkat/wakil pemerintahan pusat. Penerapan sistem ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain luasnya wilayah Negara dan banyaknya kepentingan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan bertambah majunya masyarakat sehingga pemerintah tidak dapat mengurus semua kepentingan itu dengan baik tanpa berpegang pada asas kedaerahan dalam melakukan pemerintahan.²⁵ Hubungan antara daerah otonom dan pemerintah pusat merupakan hubungan antara organisasi, bukan hubungan intraorganisasi. Adapun hubungan antara daerah otonom merupakan hubungan yang setara, tidak bersifat hierarkis.

Indonesia merupakan Negara Kesatuan, ciri yang melekat dari Negara kesatuan yaitu adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang keduanya saling berhubungan erat dan saling

²⁵ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 76.

menentukan.²⁶ Artinya, pemerintah pusat tidak akan mampu menjalankan tugas dan kewajiban dalam organisasi kekuasaan negara tanpa bantuan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah tidak akan mendapat kekuasaan (*power*) yang berbentuk kewenangan (*authority*) untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya apabila tidak diberi wewenang oleh pemerintah pusat yang diatur dalam perundang-undangan.

5. Ukuran pada Desentralisasi Fiskal

Dalam desentralisasi fiskal, umumnya terdapat tiga variabel yang sering digunakan, yaitu desentralisasi pengeluaran, desentralisasi pengeluaran pembangunan, dan desentralisasi penerimaan. Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah.

$$DDF = \left(\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{total pendapatan daerah (TPD)}} \times 100\% \right)$$

Tolak ukur kemampuan keuangan daerah ditunjukkan dalam skala interval DDF yaitu:

²⁶ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 344.

Tabel 2. 1
Kategori Kemampuan Daerah

DDF (%)	Kemampuan Keuangan
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat Baik

Sumber: Dasril Munir dalam penelitian Putri Nia Desita (2015)²⁷

Berdasarkan tabel kategori kemampuan daerah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal berarti semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai pengeluaran daerahnya, dan apabila semakin rendah derajat desentralisasi fiskalnya maka semakin rendah pula tingkat kemandirian daerah tersebut dalam membiayai pengeluaran daerahnya.

6. Pandangan Islam terhadap Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi saat ini merupakan salah satu tren dari sistem politik dan ekonomi yang diadopsi banyak negara di dunia, termasuk negara-negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim. Meskipun banyak digunakan sebagai sistem dalam politik dan ekonomi di

²⁷ Putri Nia Desita, “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pekanbaru (2010-2014)”, Jurnal Ekonomi, Vol. 2 No. 2 (Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2015), hlm. 7.

banyak negara, perhatian para peneliti terhadap desentralisasi dari perspektif Islam, masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari minimnya kajian terkait masalah desentralisasi dengan mengaitkannya pada pengalaman umat Islam, menelusurinya dari ajaran Islam, maupun realisasinya dengan konteks kehidupan umat Islam saat ini. Alasan mengapa hal ini terjadi dapat ditelusuri dalam ajaran Islam tentang pentingnya persatuan sebagaimana tercermin dalam Al-quran surah Āli Imrān ayat 103:²⁸

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
 قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

Akar pemikiran desentralisasi dapat dirujuk pada isyarat Nabi Muhammad SAW dalam pesannya kepada Mu'āz ibn Jabal saat akan diutus ke Yaman. Dalam hadits yang terkenal tersebut, Mu'āz ibn Jabal menyebutkan penggunaan Al-Quran, Sunnah, dan akal dalam

²⁸ Al-Quran dan Tajwid Blok Warna, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hlm. 103

proses penyelesaian masalah yang akan dihadapi ketika menghadapi masyarakat tanpa Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum.²⁹

Celah lain untuk pengembangan model desentralisasi juga dapat dirujuk pada pola penarikan kharāj atau pajak tanah pada masa penaklukan Islam. Para pemimpin pasukan Islam biasanya berhati-hati dalam menetapkan pajak atas tanah terhadap penduduk di daerah yang ditaklukkan. Tugas memungut pajak tersebut biasanya diserahkan kepada penguasa setempat yang memiliki kompetensi untuk mengurus birokrasi pemerintahan. Maka sistem fiskal Islam mengalami perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan perbedaan geografis.

C. Teori Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Suryanto dan Soesilowati dalam buku Rudi Badrudin menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, atau kondisi

²⁹Yuli Andriansyah, “Menuju Desentralisasi Kebijakan Ekonomi Dalam Islam: Pengalaman Dinasti ‘Usmaniyyah Abad 16-18 M dan Indonesia di Masa Orde Baru”, Jurnal Al-Amwal, Vol. 9 No. 1 (Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Islam, FIAI, Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 4

dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.³⁰ Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan manusia adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu untuk mengembangkan diri sehingga dapat menjalankan kehidupannya yang lebih baik.

Menurut Menurut Ranis, Stewart, dan Ramirez, bahwa dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia terdapat hubungan dua arah (dual causation), dimana pertumbuhan ekonomi meningkatkan pembangunan manusia namun disisi lain peningkatan pembangunan manusia memungkinkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.³¹ Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan hal yang bersifat ekonomi saja, namun juga berhubungan dengan beberapa faktor nonekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik.

³⁰ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah (Edisi Kedua)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 149.

³¹ Moh. Muqorrobin dan Ady Soejoto, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur" *Jurnal Pendidikan Ekonomi* Vol. 5 No. 3, 2017 (Surabaya: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, 2017), hlm. 4

1. Indeks Pembangunan Manusia

United Nations Development (UNDP) mulai tahun 1990 mulai memperkenalkan suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif yang dikenal dengan nama Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut Feriyanto dalam penelitian Asnidar menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.³² Sedangkan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.³³ Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang diklasifikasikan dengan beberapa dimensi dasar.

Ekonomi kesejahteraan tidak hanya tentang konsumsi saja, akan tetapi juga tentang pengembangan potensi manusia karena

³² Asnidar, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur", Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 2 No. 1 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa), hlm. 3.

³³ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia*, www.bps.go.id diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 14.00

ekonomi seharusnya lebih mengembangkan kemampuan yang melekat dalam diri manusia untuk lebih banyak memproduksi barang dan jasa dalam rangka perdagangan bebas agar memaksimalkan perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).³⁴ Dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini adalah melihat betapa pentingnya memperhatikan kualitas dari sumber daya manusia karena IPM merupakan konsep yang mendasari pembangunan untuk mencapai kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan.

2. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Adapun Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu:

- a. Angka Harapan Hidup (AHH) yang dihitung menggunakan metode tidak langsung berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup
- b. Pengetahuan diukur dengan Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah yang diperoleh dari variabel kemampuan membaca

³⁴ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah (Edisi Kedua)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 159

dan menulis serta tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan

- c. Standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan.³⁵

Namun, pada tahun 2014, dilakukan perubahan pada metodologi perhitungan IPM. Alasan perubahan perhitungan IPM yaitu:

- a. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
- b. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah
- c. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam perhitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

³⁵ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah (Edisi Pertama)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm 155

Oleh karena itu dilakukan perubahan indikator dan metode dalam perhitungan IPM, yaitu:³⁶

- a. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah
- b. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada metode lama diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita
- c. Metode agregasi dari rata-rata aritmatik pada metode lama diganti menjadi rata-rata geometrik.

3. Tujuan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) biasa digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, yaitu:³⁷

- a. Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih

³⁶ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia*, www.bps.go.id diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 14.20

³⁷ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia*, www.bps.go.id diakses pada tanggal 6 Februari 2020 pukul 13.30.

- b. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih
- c. Membentuk satu indeks komposit daripada menggunakan sejumlah indeks dasar dan menciptakan suatu indeks dasar,
- d. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

IPM digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan dan menjadi ukuran standar yang dapat dibandingkan antarwilayah atau antarnegara. Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, Negara dituntut ikut campur dalam segala aspek kehidupan sosial.

4. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka dapat dikatakan bahwa

IPM di daerah tersebut semakin baik. Status pembangunan manusia berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu:³⁸

- a. Rendah : $IPM < 60$
- b. Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- c. Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- d. Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$

Setiap komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum. Adapun nilai maksimum dan minimum sebelum menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu daerah, yaitu:

Tabel 2. 2

Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
1. Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
2. Angka Harapan Lama Sekolah	100	0	Standar UNDP
3. Rata-Rata Lama Sekolah	15	0	
4. Daya Beli	732.720 ^{a)}	300.000(1996) 360.000 ^{b)} 1999, 2000	Standar UNDP UNDP menggunakan PDB riil d disesuaikan

³⁸ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia*, hlm. 20, www.bps.go.id diakses pada tanggal 6 Februari 2020 pukul 15.00.

Sumber: Dokumen Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia*.

Keterangan: a) Perkiraan maksimum pada akhir tahun PJP II tahun 2018

b) penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

Adapun rumus yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan manusia (IPM), yaitu:³⁹

1. Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

2. Dimensi Pengetahuan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

3. Dimensi Standar Hidup Layak/Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometric dari indeks kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak/pengeluaran dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$$

Keterangan: AHH : Angka Harapan Hidup

³⁹ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah (Edisi Kedua)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 169

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-Rata Lama Sekolah

5. Pandangan Islam terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan manusia dalam agama Islam sudah mulai diterapkan pada masa perjuangan Nabi Muhammad yaitu tahun 611-632 Masehi. Salah satu bukti konkritnya tercermin dalam doa selamat yang sering dibaca sehabis shalat fardhu, yaitu:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ سَلَامَةً فِى الدِّيْنِ وَغَافِيَةً فِى الْجَسَدِ وَزِيَادَةً فِى الْعِلْمِ وَبَرَكَهَةً فِى الرِّزْقِ وَتَوْبَةً
قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا فِى سَكْرَاتِ الْمَوْتِ
وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ وَالْعُقُوفِ عِنْدَ الْحِسَابِ

Artinya: “*Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datangnya maut, rahmat pada saat datangnya maut, dan ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, berikanlah kami keselamatan dari api neraka, dan ampunan pada saat hisab*”

Pilar dari pembangunan manusia adalah kemaslahatan bagi umat manusia.⁴⁰ Apabila peningkatan kualitas pembangunan manusia dilaksanakan pada peningkatan keilmuan dan keimanan maka akan menghasilkan generasi baru yang cerdas, berilmu dan berkemajuan, memiliki keimanan dan bertauhid kepada Allah Swt dalam menjalankan kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi, serta secara tidak langsung peningkatan kualitas pembangunan manusia

⁴⁰As'ad Bukhari, “Islam dan Pengembangan Manusia di Era Globalisasi”, Jurnal Studi Islam, Vol. 5 No. 1 (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 6

yang dilaksanakan pada peningkatan keilmuan dan keimanan maka akan terciptanya lingkungan kehidupan sosial masyarakat yang baik dan beradab.

a) Pembangunan Manusia menurut Ibnu Khaldun

Salah satu pemikiran Ibnu Khaldun yang semestinya diterapkan di Indonesia yaitu mengenai kesejahteraan bangsa. Ibnu Khaldun fokus mengkaji tentang pembangunan manusia, ia berpendapat bahwa kejayaan atau keruntuhan sebuah negara atau peradaban berkaitan erat dengan kesejahteraan atau kesengsaraan rakyat.

Kesejahteraan masyarakat menurut Ibnu Khaldun bergantung pada aktivitas ekonomi, jumlah dan pembagian tenaga kerja, luasnya pasar, tunjangan dan fasilitas yang disediakan negara, serta peralatan yang memadai. Semakin banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan, maka pendapatan negara akan semakin meningkat. Apabila pendapatan negara meningkat maka tingkat tabungan dan investasi juga akan memberikan kontribusi yang besar dalam memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian maka akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika tingkat pendapatan dan kesejahteraan tinggi, maka akan terjadi kenaikan pada pendapatan pajak sehingga

memungkinkan pemerintah mengeluarkan anggaran yang lebih untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Ibnu Khaldun, masyarakat, pemerintah, dan keadilan merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan yang paling utama.

D. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini, yaitu:

Tabel 2. 3
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul, penulis, tahun.	Hasil	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	<i>Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Dana Perimbangan dan Investasi Swasta sebagai Variabel Moderasi, Anak Agung Ngurah dan Agung Kresnandra, 2016.</i>	Desentralisas fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan Dana perimbangan memperlemah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.	Variabel dependen (Y) yang digunakan sama yaitu Pertumbuhan Ekonomi Variabel independen (X) sama-sama menggunakan Desentralisasi Fiskal.	Terdapat penggunaan variabel moderasi yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus serta investasi swasta. Indikator desentralisasi fiskal dibagi menjadi Penerimaan Daerah ($X_{1.1}$) dan Pengeluaran Pembangunan Daerah ($X_{1.2}$) Penelitian dilakukan di Sembilan kabupaten/kota di

				Provinsi Bali tahun 2009-2013
2.	<i>Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bungo, Sirajudin Al-Aksari, 2015.</i>	Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo mencapai angka 7,6%, angka ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal sangat berpengaruh kuat dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo, sedangkan sisanya 92,4% dipengaruhi oleh variabel lain.	Variabel dependen (Y) sama-sama menggunakan Pertumbuhan Ekonomi Variabel independen (X) sama-sama menggunakan Desentralisasi Fiskal	Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bungo tahun 2003-2012 PDRB yang digunakan yaitu atas harga berlaku menurut lapangan usaha.
	<i>Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2009-2013, Dewi</i>	Desentralisasi fiskal di Pulau Jawa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Variabel dependen (Y) sama-sama menggunakan Pertumbuhan Ekonomi Variabel independen (X) sama-sama menggunakan	Penelitian ini dilakukan di Pulau Jawa tahun 2009-2013 Terdapat variabel Ketimpangan Pendapatan sebagai variabel dependen (Y_2)

	Rosdyana, dkk, 2015.		Desentralisasi Fiskal	
	<i>Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan dan Kesenjangan Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014</i> , Devis Fauqiatu Taqwa, dkk, 2016.	Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan di Jawa Timur.	Variabel dependen (Y) sama-sama menggunakan Pertumbuhan Ekonomi Variabel independen (X) sama-sama menggunakan Desentralisasi Fiskal	Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014 Terdapat variabel Kesenjangan Daerah sebagai variabel dependen (Y_2)
5.	<i>Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap IPM di Provinsi Aceh</i> , Zainuddin Iba, 2016.	Diperoleh bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Variabel independen (X) sama-sama menggunakan Desentralisasi Fiskal Sama-sama menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia	Penelitian dilakukan di Provinsi Aceh tahun 2010-2015
6.	<i>Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi serta Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun</i>	Adapun hasil dari penelitian ini yaitu desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 9 Kota Provinsi	Variabel independen (X) sama-sama menggunakan Desentralisasi Fiskal Sama-sama menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia	Penelitian dilakukan di 9 Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2017 Terdapat variabel Belanja Modal sebagai variabel independen (X_2)

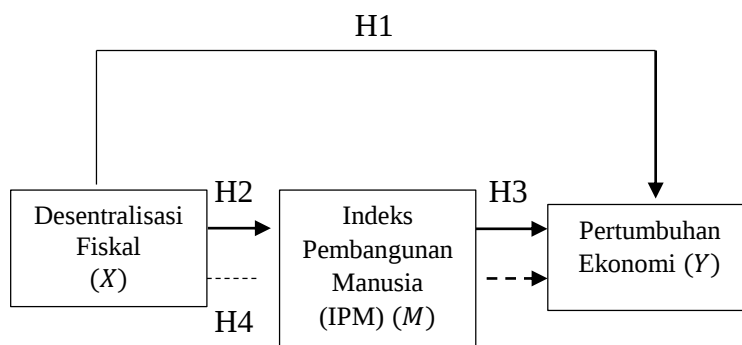
	2008-2017), Moch Rudy Setyawan dan Sjamsul Arief, 2019.	Jawa Timur tahun 2008- 2017.		
7.	<i>Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta terhadap Indeks Pembangunan Manusia, I</i> Made Aditya Pramartha dan Dwirandra, 2018.	Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.	Variabel dependen (X) sama menggunakan Desentralisasi Fiskal Sama-sama menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia	Penelitian ini dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2011-2016 Terdapat variabel independen yaitu Belanja Modal (X_2) dan Investasi Swasta (X_3)
8.	<i>Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur, Moh Muqorrobin dan Ady Soejoto, 2017.</i>	Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.	Sama-sama menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Variabel Dependen(Y) sama-sama menggunakan Pertumbuhan Ekonomi	Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur tahun 2004-2015
9.	<i>Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi</i>	Secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh	Sama-sama menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Timur tahun 2006- 2015

	<i>terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur</i> , Asnidar, 2018.	positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur Secara simultan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur	Variabel Dependen(Y) sama-sama menggunakan Pertumbuhan Ekonomi	PDRB yang digunakan yaitu PDRB atas harga berlaku Terdapat variabel Inflasi sebagai variabel independen (X_2)
10.	<i>Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau Tahun 1994-2013</i> , Nurul Izzah, 2015.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan dan parsial memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya jika IPM tinggi maka pertumbuhan ekonomi juga akan tinggi.	Sama-sama menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Variabel Dependen(Y) sama-sama menggunakan Pertumbuhan Ekonomi	Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau tahun 1994-2013 Terdapat variabel Inflasi sebagai variabel independen (X_2)

Sumber: dikumpulkan dari berbagai jurnal

E. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Keterangan : Pengaruh Intervening

Sumber: Dikembangkan dalam penelitian ini, 2020

Kerangka teoritik digunakan sebagai acuan bagi peneliti agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut: Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara desentralisasi fiskal sebagai variabel X, Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Y, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel *Intervening*.

F. Pengembangan Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen kepada variabel dependen maupun variabel *Intervening*.

1. Hubungan antara Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan jalan desentralisasi fiskal yaitu penyerahan wewenang oleh pusat (pusat/provinsi) kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Oates, desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam memproduksi dan penyediaan barang-barang publik.⁴¹ Menurut penelitian Anak Agung Ngurah dan Agung Kresnandra dapat diketahui bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.⁴² Artinya apabila desentralisasi fiskal mengalami peningkatan, maka pertumbuhan

⁴¹Sirajudin Al-Aksari, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo", Jurnal (Jambi: Alumni Prodi Keuangan Daerah Universitas Jambi, 2015), hlm. 45.

⁴² Anak Agung Ngurah dan Agung Kresnandra, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Dana Perimbangan dan Investasi Swasta sebagai Variabel Pemoderasi", Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 3 No. 2 (Program Pascasarjana Akuntansi, Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 58

ekonomi juga mengalami peningkatan dan apabila desentralisasi fiskal mengalami penurunan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan.

H1: Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Pertumbuhan Ekonomi

2. Hubungan antara Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut penelitian Zainuddin Iba diperoleh bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).⁴³ Hal ini dikarenakan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah lebih leluasa dalam menetapkan kebijakan yang pro pada masyarakat sehingga segala kebutuhan masyarakat yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat bisa langsung direspon tanpa harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

H2: Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

⁴³Zainuddin Iba, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap IPM di Provinsi Aceh", Jurnal (Dosen tetap STIE Kebangsaan Bireun, 2016)., hlm. 25

3. Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Ranis, Stewart, dan Ramirez, bahwa dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia terdapat hubungan dua arah (*dual causation*), dimana pertumbuhan ekonomi meningkatkan pembangunan manusia namun disisi lain peningkatan pembangunan manusia memungkinkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁴⁴ Untuk meningkatkan IPM dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi sebagai syarat perlu dan pemerataan pembangunan sebagai syarat cukup karena dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.⁴⁵ Sejalan dengan penelitian Nurul Izaah dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.⁴⁶ Artinya jika IPM tinggi maka pertumbuhan ekonomi juga akan tinggi.

⁴⁴ Moh Muqorrobin dan Ady Sojoto, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur”, Jurnal Kebangsaan, Vol. 5 No. 10 (Surabaya: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 2017), hlm. 4.

⁴⁵ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah (Edisi Kedua)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 161

⁴⁶ Nurul Izzah, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau Tahun 1994-2013”, Jurnal (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, 2015), hlm. 170.

H3: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

4. Hubungan antara Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai Variabel Intervening

Menurut penelitian Sirajudin, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo mencapai angka 7,6%, angka ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal sangat berpengaruh kuat dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo, sedangkan sisanya 92,4% dipengaruhi oleh variabel lain.⁴⁷ Artinya dalam menjalankan desentralisasi fiskal ada faktor lain yang mendukung dari pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi/*Intervening* dikarenakan dalam menjalankan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi

⁴⁷ Sirajudin AL-Aksari, “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo”, Jurnal (Jambi: Alumni Prodi Keuangan Daerah Universitas Jambi, 2015), hlm. 45

maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

H4: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memediasi hubungan antara Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi